

## Gambaran Keikutsertaan dan Aksesibilitas Pemanfaatan Jaminan Kesehatan oleh Pekerja Sektor Informal di Indonesia

### *Overview of Participation and Accessibility of Health Insurance Utilization by Informal Sector Workers in Indonesia*

**Dodi Satriawan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsidiempuan Km. 5, Sigama, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753

Email: [dodisatriawan@bps.go.id](mailto:dodisatriawan@bps.go.id), HP: +6282225827226

Diterima tanggal 5 Agustus 2021, diperbaiki tanggal 12 November 2021, disetujui tanggal 17 November 2021

#### *Abstract*

*The informal sector has an important role in employment. This sector is very flexible in exploiting the untapped economic potential. One thing that still needs attention is the protection for informal workers. Protection here is not only about a decent wage, but also about the accessibility of getting facilities from the government, especially health insurance. This paper aims to determine the characteristics of informal workers and their accessibility to health insurance. The data source comes from secondary data, namely raw data from the 2017 Indonesian National Socio-Economic Survey (Susenas). The analytical method used is descriptive analysis of the crosstabulation results using the SPSS tool. Based on their characteristics, Indonesian informal workers in 2017 were predominantly male, at productive age, had an elementary/equivalent education level, lived in rural areas, and worked in agricultural sector. In this paper, informal workers are not distinguished between the rural and urban informal sectors. Informal workers in Indonesia in 2017 who have health insurance by 57.3 percent, use health insurance for outpatient treatment by 33.1 percent, and for hospitalization by 56.3 percent. With this research, it is hoped that it will provide a real solution for the Government, especially the Ministry of Health, to deal with this health insurance problem and encourage informal workers to take advantage of this health insurance.*

**Key words:** *health insurance; informal workers; informal sector*

#### **Abstrak**

Sektor informal memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini sangat fleksibel dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang belum dikelola. Satu hal yang masih perlu mendapat perhatian adalah perlindungan bagi pekerja informal. Yang dimaksud perlindungan disini tidak hanya tentang upah yang layak, namun juga tentang aksesibilitas mendapatkan fasilitas dari pemerintah terutama jaminan kesehatan. Tulisan ini bertujuan mengetahui karakteristik pekerja informal dan aksesibilitas mereka terhadap jaminan kesehatan. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu *raw data* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Indonesia Tahun 2017. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif hasil *crosstabulation* menggunakan alat bantu SPSS. Berdasarkan karakteristiknya, pekerja informal di Indonesia pada tahun 2017 dominan berjenis kelamin laki-laki, berada pada umur produktif, tingkat pendidikan SD/ setara, tinggal di daerah pedesaan, dan bekerja pada sektor pertanian. Dalam tulisan ini, pekerja informal tidak dibedakan antara sektor informal pedesaan dan perkotaan. Pekerja informal di Indonesia pada tahun 2017 yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 57,3 persen, menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 33,1 persen, dan untuk rawat inap sebesar 56,3 persen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan solusi nyata bagi Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk menangani permasalahan jaminan kesehatan ini dan mendorong pekerja informal untuk memanfaatkan jaminan kesehatan ini.

**Kata kunci:** *jaminan kesehatan; pekerja informal; sektor informal*

## Pendahuluan

Sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan mayoritas tidak legal (Adliyani, 2015). Dijelaskan oleh De Cock et al., (2013), munculnya dilema ekonomi informal di Indonesia merupakan dampak dari makin kuatnya proses modernisasi yang bergerak bias menuju sifat-sifat yang dualistis. Bias pembangunan secara makro menghasilkan sistem ekonomi lain, yaitu sektor informal yang sebagian besar terjadi di negara-negara sedang berkembang. Dinamika sektor informal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dan paradigma pembangunan yang dilaksanakan selama ini. Kesenjangan sosial justru muncul akibat tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula diunggulkan sebagai indikator makro tercapainya tujuan pembangunan (Glied & Lleras-muney, 2008).

Masih sangat tingginya jumlah pekerja sektor informal harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Ketiadaan kepemilikan jaminan kesehatan akan berpengaruh terhadap utilisasi pelayanan kesehatan, pengeluaran kesehatan dan status kesehatan. Selain itu, ketiadaan jaminan kesehatan di kalangan sektor informal juga akan mengakibatkan pengeluaran katastropik yang mengancam mereka jatuh miskin (Gunawan, 2018). Hal di atas diperparah dengan kondisi pekerja sektor informal yang biasanya memiliki tempat tinggal yang kumuh, pendapatan yang rendah dan tidak menentu, serta lingkungan kerja yang tidak sehat dan bahkan membahayakan, membuat pekerja sektor informal hidup penuh risiko dan senantiasa berada dalam ancaman seperti kecelakaan kerja, penyakit atau kematian (Tarigan & Suryati, 2018). Berbagai penyakit yang bersumber dari lingkungan kerja seperti faktor kebisingan, stres akibat kerja, ataupun disebabkan oleh karena gaya hidup yang tidak sehat dapat menyerang siapapun terutama para pekerja sektor informal (Fitria, 2013).

Kegiatan usaha ini pada umumnya timbul di daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha-usaha dalam menunjang kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan sektor informal merupakan kegiatan sektor ekonomi yang dapat menyerap dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga dengan adanya sektor ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi (Nazara, 2010). Sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semiterampil dan tidak terampil. Tenaga kerja yang banyak dan tidak terampil pada umumnya merupakan masalah yang muncul di NSB (Negara Sedang Berkembang) termasuk Indonesia. Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran.

Kelebihan tenaga kerja pertanian pedesaan membuat mereka bermigrasi ke perkotaan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sektor ekonomi informal dianggap sektor yang fleksibel untuk dimasuki sebagai tujuan sementara sebelum selanjutnya menuju sektor formal. Jadi, sektor ini dianggap hanya sebagai batu loncatan atau transisi saja. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara sektor informal dengan sektor formal perkotaan. Para pekerja sektor formal sangat tergantung terhadap ketersediaan produk murah yang disediakan oleh sektor informal. Sebaliknya, kelangsungan sektor informal sangat tergantung perkembangannya dari pertumbuhan sektor formal, sebagai konsumen (Djunawan, 2018).

Peranan sektor informal menjadi penting dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pemerintah dengan keterbatasannya untuk menyediakan lapangan kerja yang layak bagi seluruh angkatan kerja membuat lapangan kerja yang disediakan tersebut menyerap tenaga kerja secara selektif. Pada umumnya lapangan kerja yang disediakan pemerintah memiliki jumlah dan spesifikasi tertentu terutama tingkat pendidikan minimal yang disyaratkan. Faktanya, sektor yang kurang diperhatikan dan dianggap marginal

ini ternyata bisa memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, dan mendukung usaha pemberantasan kemiskinan daerah perkotaan (Dartanto et al., 2017). Meskipun pada umumnya apabila dilihat dari segi pendapatan tergolong rendah, sektor ini mampu memberikan kontribusi yang besar dalam peranannya untuk mengentaskan kemiskinan.

Sektor informal sangat fleksibel dalam hal memanfaatkan potensi ekonomi yang belum dikelola, baik dalam hal jumlah dan spesifikasi tenaga kerja, permodalan, dan jam kerja. Penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit bila dibandingkan dengan sektor formal. Dengan demikian, sektor informal menjadi pilihan praktis untuk mengatasi masalah kelebihan tenaga kerja. Sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Kegiatan memasuki usaha kecil di kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Mereka yang terlibat sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil, dan kebanyakan adalah para pendatang. Berdasarkan hal ini, sektor informal harus dipandang sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan input modal dan pengelolaan yang besar (Sethuraman (1981) dalam (Pitoyo, 2016).

Tabel 1  
Jumlah Pekerja Menurut Kategori Formal Informal  
di Indonesia, Tahun 2017

Kategori Pekerja	Jumlah	Persentase
Formal	54.063.301	44,3
Informal	67.892.332	55,7
Total	121.955.633	100,0

Sumber: Susenas 2017, diolah

Para pekerja di sektor informal telah berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam usaha mencapai tujuan pembangunan meskipun bantuan dan perhatian dari pemerintah sangat minim, bahkan mereka cenderung mandiri atau tanpa bantuan pemerintah sama sekali. Dengan dukungan dan perhatian dari pemerintah terutama dalam hal meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pekerja di sektor informal maka bukan tidak mungkin usaha yang semula informal tersebut menjadi usaha formal. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah pekerja informal berada pada angka 67,9 juta orang, atau sekitar 55,7 persen dari total angkatan kerja nasional. Melihat fakta bahwa usaha-usaha di sektor informal tumbuh dengan pesat dan memiliki kontribusi yang tidak dapat diremehkan dalam pengentasan kemiskinan maka seyogyanya pemerintah memberikan dukungan nyata pada sektor ini. Sektor informal yang selama ini dipandang sebelah mata justru menjadi perwujudan dari hak rakyat dalam menentukan nasibnya dan mempertahankan kehidupannya.

Perlindungan terhadap pekerja informal menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Perlindungan terhadap pekerja informal bukan hanya bicara soal upah yang layak, akan tetapi juga mengenai akses ke fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah jaminan sosial. Jaminan sosial telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu”. *Declaration of human right* pasal 25 juga telah menyebutkan, “setiap warga negara berhak mendapat perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, menganggur dan meninggal dunia”. Kedua aturan tersebut telah menjadi dasar pentingnya jaminan sosial oleh negara untuk warganya (Kementrian Kesehatan RI, 2013). Meskipun Indonesia tidak menerapkan jaminan

sosial untuk penganggur, tetapi jaminan sosial seharusnya diterima oleh seluruh tenaga kerja baik formal maupun informal.

Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004. Jaminan sosial terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu jaminan sosial untuk kesehatan dan jaminan sosial untuk ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 menyebutkan bahwa para pekerja informal ini berhak atas program Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Kesehatan, 2016). Mayoritas pekerja informal belum tersentuh dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini bukan saja diakibatkan kurangnya program penyelenggara, tetapi berbagai kendala sosial yang berasal dari dalam karakteristik pekerja sendiri. Faktor *indown*, seperti rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan pengetahuan sebagai aspek penting. Sedangkan dari aspek luar seperti penanganan pihak birokrasi juga memiliki peran. Akibatnya jumlah pekerja yang mampu dijangkau oleh jaminan sosial tenaga kerja tidak banyak (Aisyiah Baros, 2015).

Dalam implementasinya, belum ada data pendukung yang dapat menunjukkan berapa jumlah pekerja informal yang terdaftar dalam program jaminan sosial untuk ketenagakerjaan. Karena keterbatasan data tersebut maka jaminan sosial yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah jaminan sosial untuk kesehatan bagi pekerja informal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pekerja informal baik dalam hal umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, dan lapangan usahanya serta untuk mengetahui akses pekerja informal terhadap jaminan kesehatan baik dari segi kepemilikan maupun penggunaannya.

### **Metode Penelitian**

Sumber data pada penulisan ini adalah data sekunder, yaitu *raw data* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Indonesia Tahun 2017. Pendataan Susenas Maret 2017 mencakup 300.000 rumah tangga yang terdapat dalam blok sensus biasa, tidak termasuk yang tinggal dalam blok sensus khusus, seperti kompleks militer dan sejenisnya serta rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa (BPS, 2014). Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif hasil *cross tabulation* dari *raw data* Susenas Indonesia Tahun 2017 menggunakan alat bantu SPSS. Analisis deskriptif adalah metode analisis sederhana yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat (Martono, 2012).

Batasan pekerja formal dan informal dalam tulisan ini menggunakan status/kedudukan dalam pekerjaan utama pekerja tersebut. Batasan ini mengacu pada konsep *International Conference of Labour Statistician (ICLS) 13* yang diadopsi oleh BPS dalam mendefinisikan pekerja formal dan informal. Pekerja formal dan informal dalam tulisan ini tidak dibedakan antara sektor informal perdesaan dan perkotaan. Pekerja formal adalah mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan mereka yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, sedangkan pekerja informal adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pekerja informal di Indonesia menurut status dalam pekerjaan utamanya meliputi pekerja yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Tabel 2  
Jumlah Pekerja Informal Menurut Status dalam Pekerjaan Utama di Indonesia, Tahun 2017

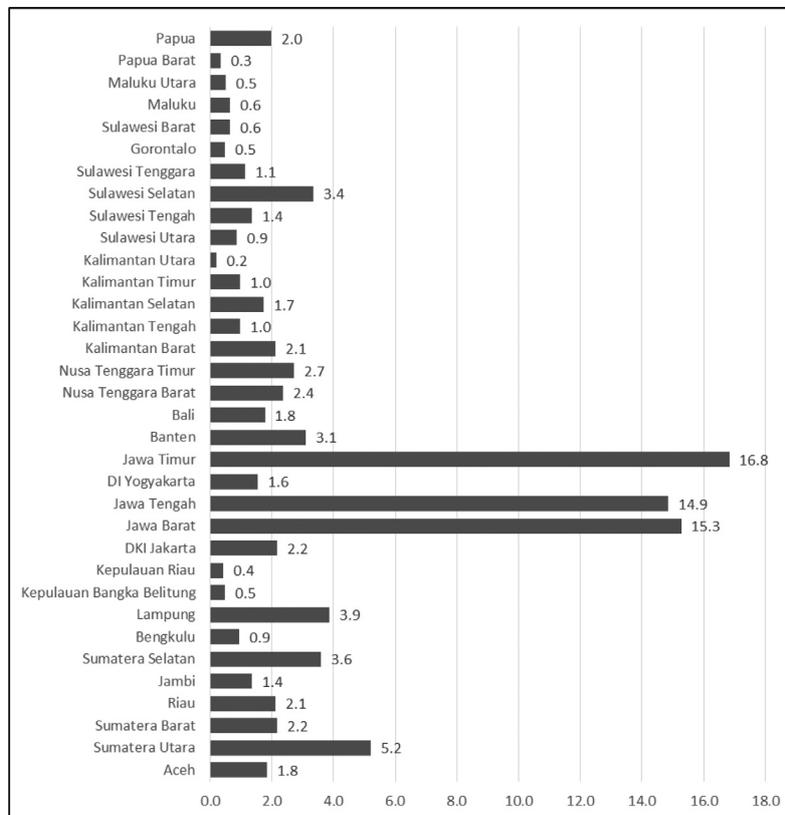
Status dalam Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
Berusaha Sendiri	28.092.713	41,3
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	14.670.968	21,6
Pekerja Bebas	11.734.089	17,4
Pekerja Keluarga atau Tidak Dibayar	13.394.561	19,7
Total	67.892.332	100,0

Sumber: Susenas 2017, diolah

Tabel 2 menunjukkan jumlah dan sebaran pekerja informal menurut status dalam pekerjaan utamanya. Pekerja informal di Indonesia didominasi oleh mereka yang berstatus berusaha sendiri sebesar 41,3 persen. Selanjutnya, mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar menduduki posisi berikutnya, yaitu sebesar 21,6 persen. Status tersebut kemudian diikuti oleh mereka yang bekerja dengan status pekerja keluarga atau tidak dibayar sebesar 19,7 persen.

Hal ini sejalan dengan penelitian Broadband Commission (2017) yang menyebutkan bahwa

salah satu ciri sektor informal adalah struktur usahanya didasarkan atas struktur unit kerja keluarga. Mereka yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar pada umumnya adalah anggota rumah tangga atau keluarga dari pekerja informal yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak dibayar. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor informal dapat diusahakan secara mandiri dari segi tenaga kerjanya. Adapun sebaran pekerja informal di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1  
Persentase Sebaran Pekerja Informal Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017  
Sumber: Susenas 2017, diolah

Gambar 1 menunjukkan bahwa dari total pekerja informal di Indonesia, Pulau Jawa merupakan pulau yang mendominasi pekerja informal. Ada di urutan pertama persentase tertinggi, yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 16,8 persen, disusul Provinsi Jawa Barat sebesar 15,3 persen di urutan ke dua, dan di urutan ke tiga adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 14,9 persen. Hal ini wajar mengingat Pulau Jawa

merupakan pusat perekonomian di Indonesia dimana para pekerja dari luar Pulau Jawa banyak yang datang untuk mencari pekerjaan dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih layak daripada di tempat asal. Selain itu, Pulau Jawa juga memiliki fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3  
Jumlah Pekerja Informal Menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan di Indonesia Tahun 2017

Karakteristik	Status/ Kedudukan dalam Pekerjaan Utama				Total	%
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga atau Tidak Dibayar		
<b>Kelompok Umur</b>						
Produktif	25.818.947	12.936.394	11.147.069	12.373.422	62.275.832	91,7
Kurang Produktif	2.273.768	1.734.576	587.019	1.021.139	5.616.502	8,3
<b>Total</b>	<b>28.092.715</b>	<b>14.670.970</b>	<b>11.734.088</b>	<b>13.394.561</b>	<b>67.892.334</b>	<b>100,0</b>
<b>Jenis Kelamin</b>						
Laki-laki	17.403.172	10.590.400	8.804.898	3.769.192	40.567.662	59,8
Perempuan	10.689.543	4.080.570	2.929.190	9.625.369	27.324.672	40,2
<b>Total</b>	<b>28.092.715</b>	<b>14.670.970</b>	<b>11.734.088</b>	<b>13.394.561</b>	<b>67.892.334</b>	<b>100,0</b>
<b>Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan</b>						
Tidak Tamat SD	4.359.156	2.922.976	2.127.441	2.245.762	11.655.335	22,7
SD/Setara	9.414.630	5.736.332	4.910.321	4.721.437	24.782.720	48,4
SMP/Setara	5.291.753	2.276.242	2.346.121	2.597.321	48.860	0,1
SMA/Setara	6.564.657	2.300.337	1.593.441	2.357.463	12.815.898	25,0
Diploma dan Sarjana	1.134.079	315.393	118.508	382.858	1.950.838	3,8
<b>Total</b>	<b>26.764.275</b>	<b>13.551.280</b>	<b>11.095.832</b>	<b>12.304.841</b>	<b>51.253.651</b>	<b>100,0</b>
<b>Daerah Tempat Tinggal</b>						
Perkotaan	14.258.309	3.907.104	4.655.815	3.246.220	26.067.448	38,4
Pedesaan	13.834.406	10.763.866	7.078.273	10.148.341	41.824.886	61,6
<b>Total</b>	<b>28.092.715</b>	<b>14.670.970</b>	<b>11.734.088</b>	<b>13.394.561</b>	<b>67.892.334</b>	<b>100,0</b>

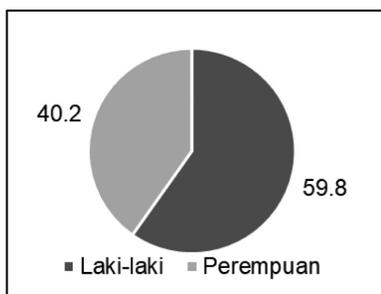
Sumber: Susenas 2017, diolah

Tabel 3 menjelaskan bahwa pekerja informal di Indonesia yang berada pada umur produktif (15 tahun dan 65 tahun) sebesar 91,7 persen. Hal ini wajar karena populasi umur produktif lebih banyak daripada populasi usia kurang produktif. Akan tetapi, yang perlu disayangkan adalah masih ada penduduk informal yang masuk kategori di bawah umur produktif dan di

atas umur produktif. Penduduk di bawah umur produktif seharusnya masih berada di bangku sekolah tanpa harus bekerja. Demikian halnya dengan penduduk di atas umur produktif, idealnya sudah menikmati hasil kerjanya selama dalam masa umur produktif. Namun demikian, pasti ada kondisi atau keterbatasan tertentu sehingga mengakibatkan penduduk di usia

kurang produktif tersebut masih harus bekerja sebagai pekerja informal. Hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Kemudian, menurut jenis kelamin, pekerja informal di Indonesia didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 59,8 persen, sedangkan perempuan sebesar 40,2 persen. Pada sebagian besar kategori status pekerjaan, selalu didominasi oleh jenis kelamin laki-laki kecuali pada status pekerja keluarga atau tidak dibayar didominasi oleh perempuan sebesar 71,9 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan yang bekerja pada sektor informal pada umumnya membantu usaha pasangannya atau anggota rumah tangga lain di samping pekerjaannya mengurus rumah tangga.



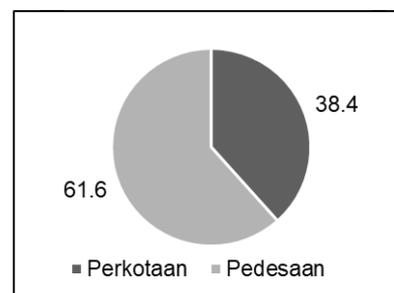
Gambar 2  
 Persentase Pekerja Informal Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2017  
 Sumber: Susenas 2017, diolah

Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja informal di Indonesia didominasi oleh tamatan SD/setara, yaitu sebesar 48,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja informal rata-rata berpendidikan rendah. Kondisi ini memperkuat pernyataan Nazara (2010) tentang ciri pekerja informal, yaitu mereka yang terlibat sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil, dan kebanyakan adalah para pendatang. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh (Amu & Dickson, 2016) yang menyatakan bahwa pilihan sektor informal adalah suatu jawaban atas rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

Tabel 3 juga menunjukkan sebaran pekerja informal di Indonesia menurut daerah tempat

tinggalnya. Berdasarkan data Susenas Tahun 2017, Pekerja informal di Indonesia sebagian besar tinggal di pedesaan (61,6 persen). Kemajuan teknologi di bidang transportasi saat ini memungkinkan para pekerja informal dari pedesaan untuk bekerja di perkotaan tanpa harus menginap. Oleh karena itu, lapangan usaha informal banyak ditemukan di wilayah perkotaan, tetapi pekerjaannya banyak berasal dari pedesaan.

Indonesia sebagai negara sedang berkembang secara umum menyerap tenaga kerja terbanyak pada sektor Pertanian. Keadaan ini juga berlaku pada pekerja informal di Indonesia. Lapangan usaha utama yang menyerap pekerja informal adalah sektor Pertanian sebesar 48,1 persen. Status pekerja terbanyak di sektor ini adalah sebagai pekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 28,9 persen dan disusul dengan pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 28,2 persen.



Gambar 3  
 Persentase Pekerja Informal Menurut Daerah Tempat Tinggal di Indonesia Tahun 2017  
 Sumber: Susenas 2017, diolah

Lapangan usaha kedua yang menyerap pekerja informal terbanyak adalah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 27,5 persen. Secara keseluruhan, 62 persen pekerja informal di sektor ini berstatus berusaha sendiri. Mereka melakukan usahanya sendiri tanpa bantuan pekerja lain. Usaha-usaha yang dapat dilakukan sendiri seperti ini pada umumnya adalah usaha yang bergerak dengan modal kecil dan berproduktif rendah.

Pendapatan yang dihasilkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha yang dilakukan sendiri juga mengindikasikan bahwa skala usahanya kecil. Kondisi ini sesuai dengan ciri sektor informal yang didefinisikan

oleh (Nazara, 2010), yaitu unit usaha keluarga dan beroperasi dalam skala kecil. Sebaran pekerja informal menurut lapangan usahanya ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4  
Jumlah Pekerja Informal Menurut Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan di Indonesia Tahun 2017

Lapangan Usaha	Status/ Kedudukan dalam Pekerjaan Utama				Total	%
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga atau Tidak Dibayar		
Pertanian	8.424.444	9.434.781	5.577.931	9.207.217	32.644.373	48,1
Pertambangan dan Penggalian	275.932	91.108	162.476	65.697	595.213	0,9
Industri Pengolahan	2.250.107	893.633	649.556	829.123	4.622.419	6,8
Listrik, Gas, dan Air Bersih	199.264	30.611	151.603	45.978	427.456	0,6
Bangunan	517.530	107.949	3.087.500	109.547	3.822.526	5,6
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	11.579.279	3.787.432	423.445	2.886.426	18.676.582	27,5
Pengangkutan dan Komunikasi	2.162.442	75.915	429.515	52.492	2.720.364	4,0
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	258.016	38.442	45.757	25.310	367.525	0,5
Jasa-Jasa	2.425.701	211.099	1.206.305	172.771	4.015.876	5,9
<b>Total</b>	<b>28.092.715</b>	<b>14.670.970</b>	<b>11.734.088</b>	<b>13.394.561</b>	<b>67.892.334</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Susenas 2017, diolah

Tabel 5 menunjukkan bahwa pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 42,7 persen. Hampir separuh dari pekerja informal di Indonesia tidak memiliki akses terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat karakteristik

tingkat pendidikan pekerja informal tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya pengetahuan para pekerja informal untuk mengakses jaminan kesehatan, baik dari cara pembuatan jaminan maupun akses terhadap informasi tentang jaminan kesehatan.

Tabel 5  
Akses Pekerja Informal terhadap Kepemilikan dan Penggunaan Jaminan Kesehatan di Indonesia Tahun 2017

Jenis Jaminan Kesehatan	Kepemilikan	%	Penggunaan			
			Berobat Jalan	%	Rawat Inap	%
Memiliki/Menggunakan	39.724.341	57,3	2.818.594	33,1	1.322.699	56,3
Tidak Punya/Tidak Menggunakan	29.640.152	42,7	5.709.284	66,9	1.028.224	43,7
<b>Total</b>	<b>69.364.493</b>	<b>100,0</b>	<b>8.527.878</b>	<b>100,0</b>	<b>2.350.923</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Susenas 2017, diolah

Penelitian yang dilakukan oleh (Purnama, 2015) menunjukkan, salah satu permasalahan yang dialami oleh pekerja informal adalah minimnya pengetahuan mengenai asuransi terutama, soal perbedaan antara tabungan, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, maupun asuransi ketenagakerjaan.

Kondisi di atas juga menunjukkan bahwa pekerja di sektor informal ini sebagian besar jauh dari perhatian pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah dan sebaran pekerja informal yang mudah berubah dan tidak teratur sehingga pemerintah kesulitan dalam mendata keberadaan para pekerja informal tersebut.

Tabel 6  
Persentase Kepemilikan dan Penggunaan Jaminan Kesehatan di Indonesia Tahun 2017

Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki	Kepemilikan	%	Penggunaan			
			Berobat Jalan	%	Rawat Inap	%
Penerima Bantuan Iuran	21.560.799	54,3	1.686.522	59,8	738.984	55,9
Non Penerima Bantuan Iuran	6.970.237	17,5	632.176	22,4	377.824	28,6
Jamkesda	10.084.369	25,4	424.381	15,1	162.705	12,3
Asuransi swasta	466.491	1,2	18.648	0,7	16.381	1,2
Perusahaan/Kantor	642.445	1,6	56.867	2,0	26.805	2,0
<b>Total</b>	<b>39.724.341</b>	<b>100,0</b>	<b>2.818.594</b>	<b>100,0</b>	<b>1.322.699</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Susenas 2017, diolah

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari total pekerja informal yang memiliki jaminan kesehatan, jenis jaminan kesehatan terbanyak yang dimiliki adalah jaminan untuk kesehatan bagi penerima bantuan iuran sebesar 54,3 persen. Berdasarkan jenis jaminan kesehatan yang dimiliki dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pekerja informal di Indonesia merupakan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Pada data Susenas, penggunaan jaminan kesehatan hanya ditanyakan apabila responden mengalami keluhan kesehatan dan melakukan tindakan pengobatan dengan cara berobat jalan selama periode sebulan terakhir atau menjalani rawat inap selama periode setahun terakhir. Oleh karena itu, akses pekerja informal terhadap penggunaan jaminan kesehatan dalam hal ini dibedakan menjadi dua kategori yaitu berobat jalan dan rawat inap.

Pekerja informal yang menggunakan jaminan kesehatan ketika mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan sebesar 33,1 persen, sedangkan yang menggunakan jaminan kesehatan pada saat rawat inap sebesar 56,3 persen. Tabel 6 juga menunjukkan bahwa persentase terbesar jaminan kesehatan yang

digunakan pekerja informal untuk berobat jalan adalah jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran sebesar 59,8 persen. Begitu pula untuk rawat inap, pekerja informal yang menggunakan jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran juga dominan, yaitu sebesar 55,9 persen.

Pekerja informal yang tidak menggunakan jaminan kesehatan ketika berobat jalan sebesar 66,9 persen dan ketika menjalani rawat inap sebesar 43,7 persen. Hal ini juga belum diketahui pasti sebabnya di antara 2 (dua) kemungkinan yang disampaikan sebelumnya karena keterbatasan data. Pada kuesioner Susenas hanya ditanyakan alasan mengapa tidak melakukan berobat jalan apabila mengalami keluhan. Baik untuk kondisi berobat jalan maupun rawat inap tidak ada pertanyaan alasan tidak menggunakan jaminan kesehatan yang dimiliki apabila memang memiliki jaminan kesehatan.

3 (Tiga) provinsi dengan persentase pekerja informal terbanyak yang memiliki jaminan kesehatan adalah Sumatera Selatan (97,2 persen), Aceh (81,1 persen), dan Papua (81,4 persen). Provinsi dengan kepemilikan jaminan

kesehatan penerima bantuan iuran terbanyak adalah Gorontalo (84,3 persen), Nusa Tenggara Timur (82,2 persen), dan Papua Barat (75,4 persen).

## Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan karakteristiknya, pekerja informal di Indonesia pada tahun 2017 dominan berjenis kelamin laki-laki, berada pada umur produktif, tingkat pendidikannya tamatan SD/ setara, tinggal di daerah pedesaan, dan bekerja pada sektor pertanian. Pekerja informal di Indonesia pada tahun 2017 yang memiliki akses terhadap kepemilikan jaminan kesehatan sebesar 57,3 persen, menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 33,1 persen, dan menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap sebesar 56,3 persen.

Dalam konteks pembangunan di bidang kesehatan, pemerintah menghadapi beberapa tantangan di antaranya adalah UHC (*Universal Health Coverage*) di Indonesia belum mampu menjangkau seluruh pekerja sektor informal, masih terdapat variasi yang cukup besar dalam hal ketercapaian UHC antarprovinsi, pekerja sektor informal di Indonesia masih bergantung pada bantuan pembiayaan jaminan kesehatan dari pemerintah, serta program bantuan pembiayaan jaminan kesehatan belum tepat sasaran sebab masih terdapat pekerja sektor informal dengan status ekonomi tinggi yang menerima program bantuan pemerintah.

### Rekomendasi

Bambang Purwoko (2016) menyebutkan bahwa berlakunya UU No 40/2004 tentang SJSN diharapkan memberikan solusi nyata bagi Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk menangani masalah jaminan kesehatan bagi pekerja informal agar mereka mendapatkan jaminan kesehatan dan dapat memanfaatkan jaminan tersebut untuk berobat. Koordinasi kebijakan khususnya dalam penyelenggaraan SJSN bagi pekerja, penduduk miskin dan orang

tak mampu sangat diperlukan. Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan seluruh pekerja informal mendapatkan haknya, yaitu memiliki perlindungan sosial sebagai tenaga kerja. Pemerintah dalam hal ini BPJS yang diamanahi untuk menjalankan hal tersebut hendaknya dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar dapat diimplementasikan kaitannya dengan perlindungan sosial bagi pekerja informal.

Selain itu, perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan para pekerja informal. Sosialisasi yang dilakukan tentang program jaminan sosial nasional agar para pekerja, khususnya pekerja informal dapat mengakses jaminan sosial.

### Ucapan Terimakasih.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik yang telah berkenan memberikan izin pemanfaatan data hasil penelitian ini, utamanya kepada para peneliti yang terlibat dalam penelitian tentang evaluasi jaminan kesehatan pekerja informal di Indonesia.

### Pustaka Acuan

- Adliyani, Z. O. N. (2015). Pengaruh Perilaku Individu terhadap Hidup Sehat. *Majority*, 4(7), 109–114.
- Aisyiah Baros, W. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Analisa Data Susenas 2013. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 04(1), 20–25.
- Amu, H., & Dickson, K. S. (2016). Health insurance subscription among women in reproductive age in Ghana: do socio-demographics matter? *Health Economics Review*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s13561-016-0102-x>
- BPJS Kesehatan. (2016). *Laporan Pengelolaan Program Tahun 2016 dan Laporan Keuangan Tahun 2016 (Auditan)* (Vol. 2016, Issue 1). <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/835>
- BPS. (2014). Survei Sektor Informal Tahun 2014. In *Sirusa.Bps.Go.Id*. Badan Pusat Statistik. <https://sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/PedomanPencacahanSSI-1danSSI-2.pdf>
- Broadband Commission. (2017). Recommendations for Action: Bridging the Gender Gap in Internet and Broadband Access and Use. In Broadband Commission (Ed.), *Broadband Commission Working*

- Group on the Digital Gender Divide, under the auspices of the United Nations (UN) Broadband Commission for Sustainable Development.* (Issue March). Broadband Commission. <http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf>
- Dartanto, T., Hanum, C., Usman, Bintara, H., Bella, A., & Putro, P. (2017). Dampak Program JKN-KIS pada Perekonomian Indonesia. In *Ringkasan Riset JKN-KIS* (Vol. 01, Issue Agustus). <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/22307a61e9670fee4d14b5138241507e.pdf>
- De Cock, K. M., Simone, P. M., Davison, V., & Slutsker, L. (2013). The new global health. *Emerging Infectious Diseases*, 19(8), 1192–1197. <https://doi.org/10.3201/eid1908.130121>
- Djunawan, A. (2018). Pengaruh jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan primer di perkotaan Indonesia: adilkah bagi masyarakat miskin? *Berita Kedokteran Masyarakat*, 5(12), 5. <https://doi.org/10.22146/bkm.37474>
- Fitria, E. (2013). Upaya Pengobatan Sendiri pada Balita dalam Era Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(5), 199–203. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i5.384>
- Glied, S., & Lleras-muney, A. (2008). Health Inequality, Education and Medical Innovation. *Demography*, 45(3), 741–761.
- Gunawan, B. T. (2018). Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pasar Tenaga Kerja: Analisis Sektor Formal Dan Informal Level Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 149–161. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i2.263>
- Kemntrian Kesehatan RI. (2013). Data Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018. In *Kemenkes Report* (Vol. 53, Issue 9).
- Nazara, S. (2010). Informal Economy in Indonesia: Size, Composition, dan Evolution. In *International Labour Organization*. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_145402.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_145402.pdf)
- Pitoyo, A. J. (2016). DINAMIKA SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro. *Populasi*, 18(2). <https://doi.org/10.22146/jp.12081>
- Purnama, A. (2015). Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal. *Jurnal PKS*, 14(2), 149–162.
- Tarigan, I., & Suryati, T. (2018). Gambaran Out of Pocket pada Awal Era JKN di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 1(2), 141–146. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v1i2.536>

